

**Redaksi**

Penanggung Jawab:  
Dody Budi Waluyo  
Pemimpin Redaksi:  
Difi A. Johansyah  
Redaksi Pelaksana:  
Harymurthy Gunawan,  
Rizana Noor, Tutut Dewanto,  
Dedy Irianto, Diyah Woelandari,  
Wahyu Indra Sukma,  
Risanthy Uli N

**Alamat Redaksi**

Humas Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta  
Telp. : 021 - 3817317,  
3817187  
email : [humasbi@bi.go.id](mailto:humasbi@bi.go.id),  
website : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Foto: "Merajut Kain Tradisi"  
oleh: Muhammad Arief Prabowo



# gerai info

Edisi 27 | Juni 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

**MEJA REDAKSI**

Pembaca yang budiman, selamat berjumpa kembali. Edisi *GERAI INFO* kali ini mengorot perihal rapor Bank Indonesia yang tersaji dalam Laporan Keuangan Tahunan BI (LKTBI) 2011. LKTBI yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Istilah teknis audit keuangan itu memang kerap kurang dipahami secara baik oleh masyarakat luas. Hal ini wajar saja. Tapi yang perlu diketahui bahwa opini WTP BPK merupakan penilaian paling tinggi atas neraca keuangan lembaga negara.

Pada edisi kali ini, pembaca akan diajak untuk mengenali apa yang dimaksud dengan LKTBI dan pos-pos penting dalam neraca keuangan tersebut yang kerap menjadi sorotan stakeholders. Misalnya, pos Pengelolaan Moneter yang mengurus banyak keuangan bank sentral. Apa dan mengapa semua itu dilakukan oleh BI, akan dipaparkan secara gamblang pada terbitan GI kali ini. Harapan kami, setelah menelusuri semua materi tersebut, pembaca akan semakin mahfum kenapa sampai keuangan BI defisit Rp25,2 triliun. ●

Salam,  
Difi A. Johansyah  
Kepala Grup Humas  
Bank Indonesia

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

**■ Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia:**

## Defisit sih, Tapi Wajar Tanpa Pengecualian

Bank Indonesia merupakan lembaga publik yang mengusung prinsip akuntabilitas dalam setiap kegiatannya. Penjabaran prinsip akuntabilitas ini dituangkan dalam bentuk berbagai laporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral yang disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Salah satu bentuk laporan tersebut adalah Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Pada prinsipnya LKTBI ini tak jauh berbeda dengan laporan keuangan sebuah badan usaha yang menggambarkan bagaimana badan usaha tersebut mengelola pendapatan dan biaya.

Meskipun prinsip laporan keuangan tidak jauh beda, tapi tujuan BI sebagai lembaga publik tidaklah mengejar profit. Prinsip perusahaan untuk mendapatkan hasil terbesar dengan modal sekecil-kecilnya tidak berlaku bagi lembaga publik seperti BI. Sebagai lembaga publik, pengelolaan keuangan BI didasarkan pada misi utama seperti yang diamanatkan Undang-Undang yakni menjaga kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah tersebut tercermin pada harga barang yang diukur dengan angka inflasi, dan terhadap nilai tukar mata uang negara lain.

Pos-pos keuangan dalam LKTBI itu menggambarkan upaya yang dilakukan BI untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. Misalnya, pos biaya pengendalian moneter yang terdiri dari operasi pasar terbuka, pengelolaan devisa, dan pinjaman luar negeri. Pada 2011, total biaya pengendalian moneter mencapai Rp30,4 triliun. Apa saja sih yang dilakukan BI sampai menghabiskan dana sebesar itu? Dana sebesar itu digunakan BI, misalnya merespons derasnya aliran masuk modal (*capital inflows*) dan ekspek likuiditas yang tinggi dengan melaksanakan bauran kebijakan. Bauran kebijakan itu mencakup kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan *capital flows*, dan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

Sementara itu, pada pos penerimaan pengelolaan moneter LKTBI terdapat nilai negatif sebesar Rp11,7 triliun yang merupakan selisih kurs karena transaksi valuta asing yang pencatatannya dikonversikan kedalam rupiah. Akibatnya, jumlah penerimaan BI menjadi sangat kecil dibandingkan dengan beban biaya, sehingga

pada 2011 LKTBI mengalami defisit sebesar Rp25,2 triliun. Keberadaan defisit ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan BI sebagai institusi publik guna mengawal kestabilan nilai Rupiah. Meskipun demikian, untuk menjaga sustainability keuangan dan sekaligus meningkatkan fungsi *governance* pengelolaan keuangan, BI melakukan sejumlah upaya pengelolaan anggaran secara lebih akuntabel dan efektif.

Apakah kebijakan-kebijakan yang ditempuh BI yang menurut sebagian orang terbilang "*costly*" tersebut memberikan manfaat pada perekonomian? Mari kita melongok angka inflasi pada 2011 yang tercatat 3,79% atau menurun tajam jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang relatif stabil dikisaran Rp9.000 per dolar AS, atau mengalami volatilitas rata-rata sebesar 6,06% sepanjang 2011. Yang ikut menggembirakan, pertumbuhan ekonomi 2011 membukukan angka 6,5%.

Sekarang coba bayangkan, bila BI tidak mengambil langkah menstabilkan inflasi, bukankah harga-harga barang dan jasa akan membumbung tinggi hingga mencekik kehidupan ekonomi rakyat. Begitu pula halnya dengan nilai tukar rupiah bila tidak terjaga, volatilitas nilai tukar yang tajam tentu akan mengganggu kegiatan para eksportir dan importir. Untuk mengawal agar pergerakan angka inflasi dan nilai tukar rupiah itu bisa terkendali, sudah barang tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Itulah makna angka defisit bank sentral sebesar Rp25,2 triliun.

Meski LKTBI 2011 mencatat angka defisit, hal itu bisa dipahami oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas BI dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah sehingga LKTBI tetap diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti laporan keuangan dinyatakan bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan BI. Predikat WTP ini sudah sembilan kali berturut-turut diberikan atas LKTBI yakni sejak 2003 hingga 2011.

Nah, meski LKTBI 2011 mencatat defisit, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas bank sentral. Dengan kata lain, yang penting bagi BI kestabilan nilai Rupiah terjaga sehingga mampu mendukung kestabilan ekonomi secara keseluruhan. ●

# Melongok Dapur LKTBI



Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2011 akhirnya selesai disusun dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini merupakan opini terbaik bagi sebuah laporan keuangan. Sebenarnya bagaimana sih LKTBI itu disusun? Mari kita melongok dapur LKTBI.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia (BI) melakukan transaksi-transaksi keuangan, antara lain penerbitan SBI/SBIS, pencetakan uang, pengelolaan cadangan devisa dan sebagainya. Setiap transaksi tersebut harus dicatat secara cermat oleh masing-masing satuan kerja pelaksana transaksi dengan

mengacu pada Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).

Pada akhir tahun, satuan kerja Departemen Keuangan Intern (DKI) merangkum transaksi-transaksi yang telah dicatat dan menyusunnya menjadi sebuah draf laporan keuangan. Setelah selesai disusun, draf laporan keuangan disampaikan kepada Dewan Gubernur BI untuk disetujui. Sesuai undang-undang, proses penyusunan LKTBI harus diselesaikan maksimal 30 hari setelah akhir tahun. Draft laporan keuangan yang telah disetujui ini, namun belum mendapatkan pengesahan BPK dikenal dengan LKTBI *Unaudited*.

Selanjutnya, maksimal 7 hari setelah disahkan, LKTBI *Unaudited* disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak mengandung kesalahan-kesalahan yang material.

Audit yang dilaksanakan BPK dilakukan dengan memeriksa kembali kebenaran dan kewajaran transaksi-transaksi keuangan BI. Selain itu,

auditor negara memeriksa apakah BI telah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan serta kekuatan pengendalian intern BI.

Agar pelaksanaan audit berjalan lancar, diperlukan koordinasi yang baik antara BPK dan BI. BI memberikan data-data keuangan dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh BPK. Disadari bahwa penyediaan data dan informasi yang cepat dan lengkap akan sangat membantu BPK dalam pelaksanaan auditnya.

Tahapan selanjutnya, sembilan puluh hari sejak proses audit dilaksanakan, BPK harus menyelesaikan audit yang dilakukan, termasuk pembahasan final antara BPK dan BI. Hasil pembahasan final ini melahirkan LKTBI *Audited* yang menandakan proses penyusunan telah tuntas.

Bagaikan masakan, matangnya sudah LKTBI dan siap disajikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Agar masyarakat dapat ikut menikmatinya, LKTBI ini dipublikasikan melalui media massa, antara lain *website* BI dan media massa lainnya. Publikasi ini dilakukan untuk menjamin dapur pengelolaan keuangan BI tetap transparan dan akuntabel.●

## RAPOR



Difi A. Johansyah,  
Kepala Grup Humas BI

Masih ingat rapor kita dulu waktu sekolah? Apa yang berkesan dari rapor kita dulu? Bagi saya, ada beberapa. Pertama, istilah catur wulan. Kedua, warna di rapor kita, biru untuk nilai 6 ke atas dan merah utk lima kebawah. Rasanya dulu mau kiamat kalau ada angka merah di rapor apalagi kalau ketahuan orang tua. Mangkanya saya ingat ada teman yang suka menyembunyikan rapornya.

Selain angka, rapor juga menyimpan catatan guru di bagian bawah lembar penilaian. Catatan guru itu macam-macam. Ada yang normatif sampai yang khusus. Saya bilang normatif, karena rasanya apapun prestasi kita di sekolah, catatan guru selalu ada. Kalau prestasi kita di atas rata-rata kelas, catatannya “harap pertahankan prestasinya”. Kalau di bawah rata-rata kelas, apalagi,

catatannya sudah bisa ditebak “harap belajar lebih giat!”.

Disamping yang normatif, ada juga catatan apabila sang guru menyoroti perilaku khusus muridnya. Biasanya catatan ini memang agak negatif nuansanya. Misalnya, saya pernah dapat catatan “jangan melamun di kelas!” atau seperti teman saya pernah dapat catatan “jangan suka nyontek!”

Ingatan saya soal rapor ini muncul kembali setelah bekerja. Sebagai pegawai, kinerja sayapun dinilai, dan seringkali dengan catatan, yang katanya untuk pembinaan kedepan. Tidak hanya pegawai, organisasinya pun juga dinilai. Penilaiannya pun bermacam-macam jenisnya. Ada penilaian dan pengukuran kinerja, ada penilaian tata kelola, dan yang paling sering ditemui dan rutin adalah audit keuangan.

Audit keuangan merupakan keharusan bagi suatu organisasi. Auditor memeriksa kewajaran dan kebenaran jumlah dan nilai

transaksi keuangan yang ada di organisasi. Benar dan wajar pun tidak cukup, karena ada perilaku organisasi yang turut dinilai. Oleh karenanya seringkali hasil audit juga memunculkan catatan auditor akan kewajaran neraca keuangan yang diaudit. Kesemuanya berbentuk opini dari auditor.

Opini auditor boleh dibilang seperti rapor kita dulu. Apabila ada catatan khusus, maka kebenaran neraca keuangan organisasi bisa menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, memperoleh neraca keuangan dengan tanpa catatan, atau predikat “wajar tanpa pengecualian” merupakan dambaan bagi organisasi yang menginginkan tata kelola yang baik. Seperti rapor kita dulu, nilai biru tidak ada gunanya kalau kita peroleh dari nyontek. Begitu juga organisasi, neraca keuangan yang baik akan kurang bermakna kalau tata kelolanya punya catatan pengecualian, alias masih kurang memadai.●

# Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BI



Sri H.R. Pahlevi,  
Analisis Keuangan  
Departemen Keuangan Intern

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholders*, Bank Indonesia (BI) menyusun laporan keuangan tahunan yang mencerminkan kondisi keuangan BI pada akhir periode akuntansi (31 Desember) dan pengaruh dari transaksi-transaksi selama periode tersebut. Selain itu, BI juga menyusun Neraca Singkat Mingguan (NSM) yang dipublikasikan pada Lembaran Berita Negara, dan Laporan Anggaran Tahunan Bank Indonesia serta Laporan Evaluasi Anggaran (Triwulanan dan Semesteran). Laporan keuangan dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR-RI melalui Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat pelaksanaan audit.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) yang diaudit oleh BPK terdiri dari Neraca, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKTBI tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan BI yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, LKTBI harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.

Dalam menyusun laporan keuangan, BI berpedoman pada kebijakan akuntansi yang berlaku khusus, yaitu Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) yang disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS) serta praktek

terbaik akuntansi bank sentral. Kekhususan kebijakan akuntansi tersebut merupakan cerminan dari keunikan BI dibandingkan dengan institusi lain.

Salah satu asumsi yang digunakan dalam penyusunan LKTBI adalah *going concern*, yaitu asumsi bahwa suatu lembaga akan beroperasi secara terus menerus. Pada suatu lembaga komersial yang mempunyai tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit oriented*), kondisi defisit yang berkepanjangan tentu dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tidak demikian halnya dengan BI. Selaku bank sentral, BI bukan lembaga yang *profit oriented*. Keuntungan (surplus) yang diperoleh atau kerugian (defisit) yang harus ditanggung oleh BI merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya sebagai otoritas dalam menetapkan kebijakan publik yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Jika ditelaah, defisit laporan keuangan BI pada tahun 2011 sebesar Rp25,2 triliun terutama sebagai konsekuensi dari beban biaya pelaksanaan kebijakan di sektor

*profitability*. Kondisi defisit tersebut tidak berarti menurunkan besarnya nilai Aktiva/Pasiva Bank Indonesia. Jika dilihat dari sisi neraca, aktiva dan pasiva BI mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Adakah piranti moneter lain yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan beban yang relatif lebih kecil? Dalam hal ini tentu saja diperlukan kerjasama yang baik antara BI, Pemerintah dan Perbankan. Derasnya aliran dana masuk hendaknya dapat dioptimalkan sedemikian rupa untuk membangun infrastruktur ekonomi yang baik sehingga akan mendongkrak roda perekonomian nasional. Jika dana masuk banyak parkir diperbankan atau disimpan dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) atau Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), pada akhirnya akan membebani BI.

Untuk menjaga sustainabilitas keuangan dan sekaligus meningkatkan aspek *governance* pengelolaan keuangan, BI melakukan sejumlah upaya pengelolaan anggaran secara lebih akuntabel dan efektif. Upaya itu antara lain: (1) menetapkan batas minimal deviasi realisasi anggaran sebesar 5% terhadap alokasi anggaran, yang mendorong masing-masing unit

(dalam triliun Rupiah)

Neraca	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Aktiva</b>	1.371,84	1.180,01	915,88	864,20	973,03
<b>Pasiva:</b>					
- Kewajiban	1.282,27	1.111,21	822,37	714,35	861,40
- Ekuitas	89,57	68,80	93,51	149,85	111,63

Sumber: LKTBI *Audited*

moneter yang tercatat sebesar Rp30,36 triliun atau sebesar 71,33% dari total pengeluaran BI sebesar Rp42,56 triliun. Tingginya beban pengeluaran BI di sektor moneter khususnya terkait dengan kegiatan pengendalian moneter. Ini masih ditambah lagi dengan adanya kerugian selisih kurs yang harus ditanggung oleh BI karena penjabaran transaksi valuta asing ke dalam Rupiah (*translation effect*) yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Meskipun defisit merupakan hal yang lumrah bagi bank sentral, BI tetap berupaya untuk menguranginya antara lain dengan melakukan optimalisasi pengelolaan cadangan devisa yang dimiliki dengan memperhatikan prinsip *safety, liquidity*, dan

kerja meningkatkan efisiensi anggaran dan akurasi perencanaan; (2) menyusun *budget profile* untuk masing-masing unit kerja agar pengalokasian anggaran dapat sesuai dengan prioritas dalam pencapaian tujuan utama organisasi; dan (3) melakukan pembahasan *Asset Liabilities Management* (ALM) Republik Indonesia secara intensif bersama Pemerintah sebagai upaya menjaga sustainabilitas keuangan BI dan Pemerintah dalam jangka panjang.

Nah, BI bersama Pemerintah dan sektor swasta perlu melakukan upaya perbaikan perekonomian yang berimplikasi pada berkurangnya beban pengelolaan moneter. Upaya ini perlu dilakukan karena pada dasarnya sustainabilitas keuangan BI merupakan salah satu pilar sustainabilitas perekonomian nasional. ●

# Jurus BI

## Menyerap Ekses Likuiditas



Rozidyanti,  
Analis Ekonomi  
Departemen Pengelolaan Moneter

Calon pembeli *gadget* di sebuah pameran elektronik di Jakarta terpaksa merogoh kocek lebih dalam karena harga alat dengan teknologi tinggi itu mengalami kenaikan. Padahal kalau melihat harga *gadget* tadi dalam dolar Amerika Serikat, tidaklah mengalami kenaikan. Kenaikan harga dalam rupiah terjadi karena faktor kurs yang mengalami tekanan depresiasi cukup tinggi.

Gejolak nilai tukar Rupiah yang tajam entah karena apresiasi atau depresiasi, memang kerap bikin sewot banyak kalangan. Ketika Rupiah terapresiasi dan membuat harga produk impor jadi murah yang sorak-sorai adalah konsumen dan importir. Bagi eksportir hal itu justru bikin gigit jari karena membuat harga produk ekspor mereka jadi mahal dan tak kompetitif.

Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral mengemban amanah Undang-Undang mengawal kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan yang dimaksud di sini terkait dengan stabilitas harga barang yang tercermin pada angka inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam hal mengawal stabilitas nilai tukar, BI harus mengupayakan ketersediaan Rupiah maupun valuta asing dengan jumlah sesuai kebutuhan, baik untuk masyarakat, bank atau perusahaan.

Kalau melihat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2011, pada Laporan Surplus/ Defisit tergambar pos-pos penyumbang beban biaya yang cukup besar. Salah satunya adalah beban Pengendalian Moneter yang membukukan angka Rp30,35 triliun, atau 71,33% dari total beban Rp42,56 triliun. Beban ini setelah dipotong total penerimaan sebesar Rp17,35

triliun menyisakan defisit LKTBI Rp25,2 triliun.

Sekarang coba ditelisik, apa saja sih komponen pos Pengendalian Moneter itu? Pos ini terdiri dari Operasi Pasar Terbuka (OPT), Pengelolaan Devisa, Pinjaman Luar Negeri dan Beban Pengendalian Moneter Lainnya. Yang menonjol adalah beban biaya OPT sebesar Rp30,09 triliun. OPT merupakan salah satu instrumen guna mendukung kebijakan moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Bagaimana ceritanya sampai OPT ini menjadi *cost center* dalam LKTBI, berikut sekelumit kisahnya.

Belakangan ini, sektor perbankan memiliki ekses likuiditas dalam jumlah besar yang belum terserap sektor riil. Bilangannya mencapai Rp100 triliun bahkan bisa lebih setiap harinya. Duit nganggur segede itu bisa dipakai untuk apa saja seperti memborong valas yang serta merta bisa bikin Rupiah melemah. Ekses likuiditas itu masih ditimpali lagi aliran dana asing yang berinvestasi di perusahaan dalam negeri atau membeli surat berharga domestik.

Lantas, bagaimana BI mengelola kebijakan moneternya? Untuk menyerap ekses likuiditas, BI menggunakan instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan SBI Syariah (SBIS) untuk perbankan syariah, *Term Deposit* (penempatan berjangka), *Reverse Repo* Surat Berharga Negara (RR SBN), *Deposit Facility* untuk penempatan dana, baik untuk bank konvensional maupun syariah, dan intervensi jual IDR/USD serta *Swap* beli.

Diantara sekian banyak instrumen moneter tersebut, SBI merupakan instrumen OPT yang paling banyak digunakan BI untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar uang. Untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen SBI dan mengurangi penempatan jangka pendek di instrumen ini, BI memperpanjang jangka waktu (tenor) SBI hingga sembilan bulan dan penjarangan pelaksanaan lelang dengan harapan agar likuiditas dapat diserap lebih lama. Selain itu BI juga memperpanjang *holding period* kepemilikan SBI dari satu bulan menjadi enam bulan. Sebelum jangka waktu itu pemilik tidak boleh memperjual-belikan SBI tersebut. Ekses likuiditas yang berhasil diserap melalui lelang SBI (termasuk SBI

Syariah) pada akhir 2010 tercatat Rp203 triliun lalu susut menjadi Rp123 triliun pada akhir 2011.

Seiring penurunan angka SBI, ekses likuiditas di pasar pun membengkak dan berbahaya bila dibiarkan liar. Untuk itulah BI menyiapkan instrumen OPT lain bertajuk Penempatan Berjangka (*Term Deposit/TD*) dalam Rupiah. Jangka waktu TD Rupiah cukup fleksibel mulai dari satu hari hingga satu tahun yang diterbitkan sesuai dengan penilaian BI terkait kondisi pasar. TD Rupiah tidak dapat diperjualbelikan. Namun dalam hal bank memerlukan dana diluar perkiraan, bank dapat melakukan *early redemption* atau menghentikan penempatan sebelum jatuh tempo. Pada Neraca LKTBI 2011, instrumen TD Rupiah menyerap ekses likuiditas sebesar Rp152,8 triliun. Sejak Juni 2012, BI memperkenalkan instrumen TD Valuta Asing untuk menyerap likuiditas dalam mata uang asing. Instrumen ini merupakan pelengkap atas OPT Valas yang selama ini telah dilakukan BI.

Instrumen OPT lain yang juga lazim dipakai untuk menyerap ekses likuiditas adalah lelang SBN yang dimiliki BI, dengan perjanjian BI akan membeli kembali saat jatuh tempo (RR SBN). Penyerapan ekses likuiditas melalui RR SBN tercatat sebesar Rp68,75 triliun.

Setelah BI melakukan penyerapan ekses likuiditas melalui instrumen-instrumen di atas ternyata perbankan masih memiliki kelebihan likuiditas, bank masih bisa menempatkan kelebihan likuiditas harian pada instrumen *Deposit Facility* (DF) yang berjangka satu malam (*overnight*). Pada posisi akhir 2011, DF berjumlah Rp152,47 triliun. Untuk bank-bank syariah tersedia pula DF Syariah yang pada akhir 2011 mampu menyerap ekses likuiditas sebesar Rp17,4 triliun.

Sementara itu, dalam rangka mengatasi kekurangan dana di perbankan pada akhir hari, BI dapat memberikan fasilitas SBI Repo atau SBN Repo. Namun, fasilitas ini tidak banyak dimanfaatkan oleh bank karena pada umumnya bank akan memanfaatkan dana yang ada di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Nah, dari paparan di atas, terlihat secara gamblang betapa besarnya perhatian BI menyiapkan berbagai jurus dalam mengelola kebijakan moneter, khususnya untuk menyerap ekses likuiditas. Ke depan, BI akan terus berupaya menciptakan jurus-jurus baru untuk mengurangi beban perekonomian akibat ekses likuiditas. ●

## ■ Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) :

# Mengenal Lebih Jauh SAK Bank Sentral

Laporan keuangan adalah muara akhir dari keseluruhan siklus kegiatan dan transaksi suatu institusi, yang merupakan pertanggungjawaban keuangan dari manajemen (pengelola) lembaga tersebut kepada pemilik.

Institusi komersial menyusun laporan keuangannya dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang menyusun standar akuntansi di negara masing-masing. Sedangkan Bank Indonesia (BI), bahkan jauh sebelum independensi BI sebagai bank sentral dengan terbitnya Undang-Undang No. 13 tahun 1999, telah menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI terakhir kali diperbaharui pada tahun 2006.

PAKBI adalah kaidah dan aturan yang merupakan kebijakan akuntansi BI untuk mengidentifikasi, mencatat, mengukur dan menyajikan transaksi atau kejadian yang berdampak pada keuangan BI.

**Kenapa BI tidak menggunakan SAK Umum saja untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya seperti bank komersial?**

Untuk memahami apa bedanya SAK Umum dan PAKBI, maka perlu terlebih dahulu dipahami perbedaan karakteristik keuangan BI dibanding entitas komersial. Pemilik entitas komersial bisa individu atau perusahaan, sedangkan pemilik BI adalah seluruh rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dalam hal ini diwakili Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berbeda dengan institusi komersial yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pemegang saham atau pemilik, BI sebagai lembaga publik bukan institusi yang *profit oriented*. BI mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tiga bidang tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Sesuai UU, tujuan dan tugas tersebut hanya dapat diemban dan dilaksanakan oleh BI, tidak oleh institusi lainnya.

Sebagai institusi negara, BI menghasilkan produk-produk kebijakan yang dapat dikategorikan jasa publik. Semua pihak dapat memanfaatkan produk BI tanpa dapat dicegah dan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan (*non-excludability*), serta tidak mengurangi kebebasan pihak lain untuk memanfaatkan produk yang sama (*non-rivalness*).

Keunikan karakteristik BI tersebut tentunya mempengaruhi keunikan proses bisnis yang dijalankan BI. Sebagai contoh, walaupun BI dan bank komersial memiliki instrumen investasi yang sama, motif kepemilikan dan manajemen atas investasi tersebut jauh berbeda. Bagi BI instrumen investasi tersebut merupakan salah satu alat stabilitas moneter seperti investasi dalam bentuk surat berharga, termasuk Surat Utang Negara (SUN). Tujuan tunggal stabilitas moneter tersebut harus dicapai dengan **biaya sebesar apapun**. Semua kebijakan, tindakan, produk, yang dihasilkan BI ditujukan untuk mencapai stabilitas moneter tersebut. Keunikan proses bisnis BI ini menimbulkan perbedaan dampak terhadap pencatatan akuntansi serta pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan BI.

Untuk menyusun laporan keuangan yang baik diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik institusi. SAK Umum disusun berdasarkan kerangka dasar (*framework*) penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk institusi komersial. Karakteristik khusus bank sentral yang berbeda dengan institusi komersial dan institusi pemerintahan menimbulkan kompleksitas implementasi standar akuntansi di bank sentral. Untuk menjembatani *gap* antara SAK umum dengan praktik yang dilakukan BI sebagai bank sentral, maka disusunlah PAKBI.

**Apakah PAKBI sama sekali berbeda dengan SAK Umum?**

Penyusunan PAKBI banyak mengacu pada SAK Umum yang berlaku pada saat itu, dan juga mempertimbangkan praktek akuntansi yang berlaku di bank sentral lain serta hal-hal khusus yang diatur UU BI. Saat ini, SAK Umum telah berkembang dengan pesat karena tren konvergensi ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Hal tersebut menyebabkan dilema bagi BI. Di satu sisi, karena PAKBI disusun

dengan banyak mengacu kepada SAK Umum, maka seolah-olah BI juga harus mengupdate PAKBI dengan perkembangan SAK Umum terkini. Di sisi yang lain, SAK Umum tidak sepenuhnya bisa mengakomodir kekhususan karakteristik dan transaksi keuangan BI.

**Apakah PAKBI akan ikut dengan trend konvergensi IFRS? Bagaimana dengan praktek akuntansi bank sentral lain?**

Untuk menjawab pertanyaan di atas mari kita lihat apa yang terjadi di bank sentral lain dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh BI dengan PAKBI-nya?

Atas isu tren konvergensi terhadap IFRS, BI telah melakukan kajian akademis dan diskusi intensif dengan para pakar akuntansi dan kebanksentralan dalam dan luar negeri. Diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan karakteristik unik BI sebagai bank sentral, maka BI tidak dapat langsung mengadopsi secara keseluruhan IFRS seperti yang diterapkan oleh institusi komersial.

Walaupun demikian, BI juga tidak menutup mata terhadap perkembangan praktek akuntansi yang dilakukan oleh bank sentral lain. Konferensi European Central Bank (ECB) di Frankfurt, Jerman pada tanggal 4 – 5 Juni 2012 yang dihadiri 165 peserta dari berbagai bank sentral di dunia menunjukkan bahwa praktek akuntansi bank sentral dapat dibagi menjadi tiga besaran. Pertama, bank sentral yang mengadopsi SAK umum di negaranya, baik secara penuh atau dengan modifikasi, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kedua, bank sentral yang mengadopsi standar akuntansi ECB, seperti negara-negara Eropa. Ketiga, bank sentral yang mengadopsi IFRS, seperti Ukraina dan Australia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pertemuan tersebut, bahwa penerapan IFRS yang menganut *fair value accounting* belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk keperluan akuntansi bank sentral.

Bagi BI tantangan saat ini adalah bagaimana agar PAKBI berevolusi menjadi kerangka konseptual dan standar akuntansi yang paling tepat. Untuk itu BI masih melakukan kajian lebih lanjut dan menilai untuk mengadopsi bagian-bagian yang relevan bagi bank sentral dalam penerapan SAK Umum yang telah konvergen IFRS. Muara semua ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BI kepada masyarakat. ●

# Mencari Solusi Defisit Keuangan BI

Dalam rangka memperoleh informasi dan *sharing* pengetahuan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), pada hari Selasa, 5 Juni 2012 bertempat di Menara Sjafruddin Prawiranegara lantai 22, Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (DPSK) menyelenggarakan Seminar Terbatas berjudul “Defisit dan Sustainability Keuangan Bank Indonesia”. Selaku pembicara utama dalam seminar terbatas ini adalah Marsuki dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dengan moderator Triono Widodo, *Advisor Senior* dari DPSK. Sementara itu, peserta seminar berasal dari beberapa satuan kerja

dari sektor valas justru mengalami penurunan karena apresiasi nilai rupiah.

Dia mengusulkan sejumlah alternatif antisipatif dalam menyikapi angka defisit pada neraca keuangan BI 2011 yang bisa dipertimbangkan oleh BI, Pemerintah dan Komisi XI DPR RI. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh BI antara lain: (i) menyesuaikan bentuk pelaporan neraca bank sentral dari bentuk konvensional menuju neraca bank sentral bentuk komprehensif, (ii) menekan biaya operasi moneter melalui pengurangan porsi SBI bertahap dan menggunakan *Reverse Repo* Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrumen utama penyerapan likuiditas, (iii) melakukan restrukturisasi aset melalui strategi *Asset Liability Management* berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperdalam pasar obligasi (*domestic bond*) dan memperkuat neraca BI, (iv) penyesuaian dalam penerapan standar akuntansi dan perubahan kelembagaan.

Dari sisi pemerintah yang dapat dilakukan antara lain: (i) pengurangan eksposur kepemilikan SUN oleh pihak asing melalui *Month Holding Period* terhadap SUN, tanpa harus melakukan kontrol devisa terhadap investor, (ii) memperdalam pasar obligasi domestik dengan cara memperluas basis investor dalam negeri di pasar SUN. Sementara itu, dengan dukungan komisi XI DPR, pemerintah juga dapat memperkuat neraca BI dengan melakukan restrukturisasi sebagian Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi SUN yang dapat diperdagangkan. Sehingga kondisi permodalan BI menjadi lebih kuat. Selama ini SUP merupakan komponen aset BI yang tidak bisa diperdagangkan.

Pada bagian akhir, dia mengusulkan agar ke depan BI tidak membatasi pada penanganan aspek moneter saja, namun dapat lebih berperan dalam menangani sektor riil yang dapat dicerminkan pada tujuan

kebijakan BI selain pencapaian target inflasi juga mengatasi masalah pengangguran. Dengan memasukkan tujuan kebijakan BI untuk mengatasi pengangguran, diharapkan BI akan turut berperan mendorong aliran uang dari pasar keuangan sampai ke sektor riil. Diharapkan usulan tersebut dapat menjadi masukan yang positif dalam proses penyusunan amandemen UU mengenai BI.

Sebagai informasi saja, eksese likuiditas di sektor perbankan dalam negeri yang mengendap dalam bentuk *Deposit Facility* di BI sebesar Rp152,47 triliun pada posisi akhir tahun 2011, angkaitubelum termasuk yang tersimpan dalam bentuk SBI, *Term Deposit*, dan SUN. Uang segede itu adalah dana nganggur yang belum terserap ke sektor produktif. Tak heran kalau rasio kredit yang disalurkan perbankan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih terbilang kecil, apalagi bila dibanding negara tetangga. Angka rasio rata-rata penyaluran kredit terhadap PDB di ASEAN sebesar 67,16%. Sementara bila menengok negeri jiran seperti Malaysia, angkanya mencapai 116%, Singapura 213,43% dan Thailand 87,25%. Indonesia? Hanya 29,6% saja tak jauh beda dengan Filipina 32,31%. Padahal, Indonesia mempunyai jumlah konsumen terbesar dibandingkan negara lain di ASEAN.

Jadi, perihal defisit yang diderita BI sebagai bank sentral dalam menjalankan tugasnya menjaga kestabilan nilai Rupiah, sejatinya bukan melulu urusan internal BI melainkan gawean semua elemen anak bangsa ini. Selama ini BI menanggung beban eksese likuiditas yang tidak akan pernah selesai, apabila perekonomian tidak mampu menyerapnya untuk tujuan produktif. Sebenarnya, permasalahan yang tampak dalam laporan keuangan BI merupakan cermin permasalahan ekonomi nasional. Nah, disinilah BI, Pemerintah dan DPR kudu perlu duduk bareng dalam mencari solusi agar neraca keuangan bank sentral bisa lebih sehat. Bukankah kalau keuangan BI sehat, identik dengan perekonomian nasional yang sehat. ●

The image shows a screenshot of the Bank Indonesia Financial Report (LAPORAN KEUANGAN). The report is presented in a table format with multiple columns and rows, detailing various financial metrics and ratios. The table is organized into several sections, including assets, liabilities, and capital. The data is presented in Indonesian Rupiah (Rp) and includes various financial indicators such as total assets, total liabilities, and capital. The report is dated 30 June 2012.

di BI dengan total peserta yang hadir sekitar 35 orang.

Dalam diskusi, beberapa hal yang diungkapkan Marsuki mulai dari latar belakang yang mempengaruhi neraca keuangan bank sentral, pemahaman teori untuk memprediksi pola surplus/defisit, langkah antisipatif dalam mengelola defisit hingga upaya menjaga sustainability struktur keuangan BI. Menurut dia, kondisi defisit tersebut disebabkan karena dampak *shock* eksternal *capital inflows-outflows*, volatilitas di pasar keuangan, eksese likuiditas, apresiasi rupiah yang mengakibatkan peningkatan kewajiban moneter sehingga menekan neraca BI lebih kuat. Di sisi lain, penerimaan BI

# Dibalik Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Ramdan Denny Prakoso,  
Kepala Divisi  
Departemen Audit Intern

Dalam dunia kebanksentralan, meraih opini tertinggi dari auditor atas laporan keuangan tahunan sepertinya menjadi sebuah kewajiban. Lihat saja tetangga kita, seperti *Bank Negara Malaysia*, *Bank of Thailand* atau *Reserve Bank of Australia*. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) versi masing-masing, menjadi kejadian rutin tahunan. Hal ini sangat dimaklumi karena opini tersebut akan ikut mempengaruhi kredibilitas bank sentral dalam berbagai kebijakannya. Aneh saja membayangkan kalau BI tidak mampu mendapat opini WTP, lalu dalam keseharian BI mengharuskan perbankan untuk disiplin menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

Pada Mei tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini WTP atas laporan keuangan tahunan BI (LKTBI)-2011. Artinya, laporan keuangan BI dinyatakan bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan BI sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umum dilakukan bank sentral.

BPK merupakan lembaga tinggi negara dengan otoritas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mereka akan memberikan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas. Opiniya ada 4 macam, yaitu opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified*), Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*Qualified*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), atau Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*).

Tentunya, meraih opini WTP bukan merupakan perkara mudah. Setelah selama 5 tahun berturut-turut (2003 s.d 2007) BI dapat opini WTP, di awal 2009 BI mendapatkan penghargaan BPK award sebagai salah satu institusi 'Penyaji Laporan Keuangan Terbaik'.

Banyak kalangan yang sering kali kurang memahami cakupan pemeriksaan BPK, yang 'terkesan liar dan luas' karena banyak yang tidak berkaitan langsung dengan urusan laporan keuangan. Rupanya, cakupan pemeriksaan yang dilakukan BPK memang tidak hanya mencakup urusan keuangan saja. Standar mereka mengamankan agar pemeriksaan mencakup pula aspek kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku (baik internal maupun eksternal) dan pengendalian intern.

Kalau melihat formula diatas dapat dipahami luasnya area yang harus ditelusuri dan diperiksa BPK. Namun, kenyataan ini harusnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan sepanjang pelaksanaan kegiatan di BI dilakukan secara profesional serta menjunjung prinsip-prinsip tata kelola.

Sesuai Undang-Undang (UU), BPK hanya diberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan prosesi pemeriksaan, yang dimulai setiap Februari setelah LKTBI *Non-Audited* disampaikan ke BPK. Kalau melihat ini, seakan-akan rutinitas tahunan pemeriksaan BPK hanya sampai dengan April. Namun saat ini kenyataannya tidak demikian. Sejak LKTBI 2005, BPK juga melakukan pemeriksaan interim yang biasanya dimulai Oktober hingga Desember. Kemudian dilanjutkan dengan *stock opname* nilai-nilai berharga akhir tahun, seperti uang, bahan uang dan emas. Pada Februari dilakukan pemeriksaan final.

Pada pemeriksaan interim, BPK lebih memfokuskan obyek pemeriksaannya pada satuan-satuan kerja di BI yang kontribusinya cukup signifikan terhadap akun-akun laporan keuangan BI. Selanjutnya, pada pemeriksaan final di Februari, hampir semua satuan kerja di BI menjadi obyek pemeriksaan. Konsekuensinya, satuan-satuan kerja tersebut harus

siap memenuhi permintaan BPK seperti menyediakan data serta memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai hal tertentu.

Sebulan sebelum akhir pemeriksaan pada akhir Maret, biasanya memasuki masa yang boleh dibilang  *hectic*  karena sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Auditor akan menyampaikan sejumlah kandidat temuan sebagai bahan diskusi dan masing-masing satuan kerja diminta memberi tanggapan sesegera mungkin. Kalau permasalahannya cukup berat, penyusunan tanggapan harus melalui beberapa kali diskusi antara BI-BPK, termasuk dengan membawanya ke forum tertinggi dua lembaga tersebut.

Selain opini terhadap laporan keuangan, pemeriksaan BPK akan menghasilkan sejumlah temuan untuk ditindaklanjuti BI. Temuan-temuan tersebut terkait kepatuhan BI terhadap UU atau ketentuan yang berlaku serta temuan adanya kelemahan pengendalian intern. Bagi temuan audit yang sifatnya besar (*major*), itu akan menjadi bagian dari laporan yang disampaikan ke  *stakeholder*  utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun untuk temuan-temuan lainnya, akan disampaikan langsung ke BI. Tiap tahun, temuan audit yang sifatnya  *major*  berkisar antara 10 sampai 20 temuan.

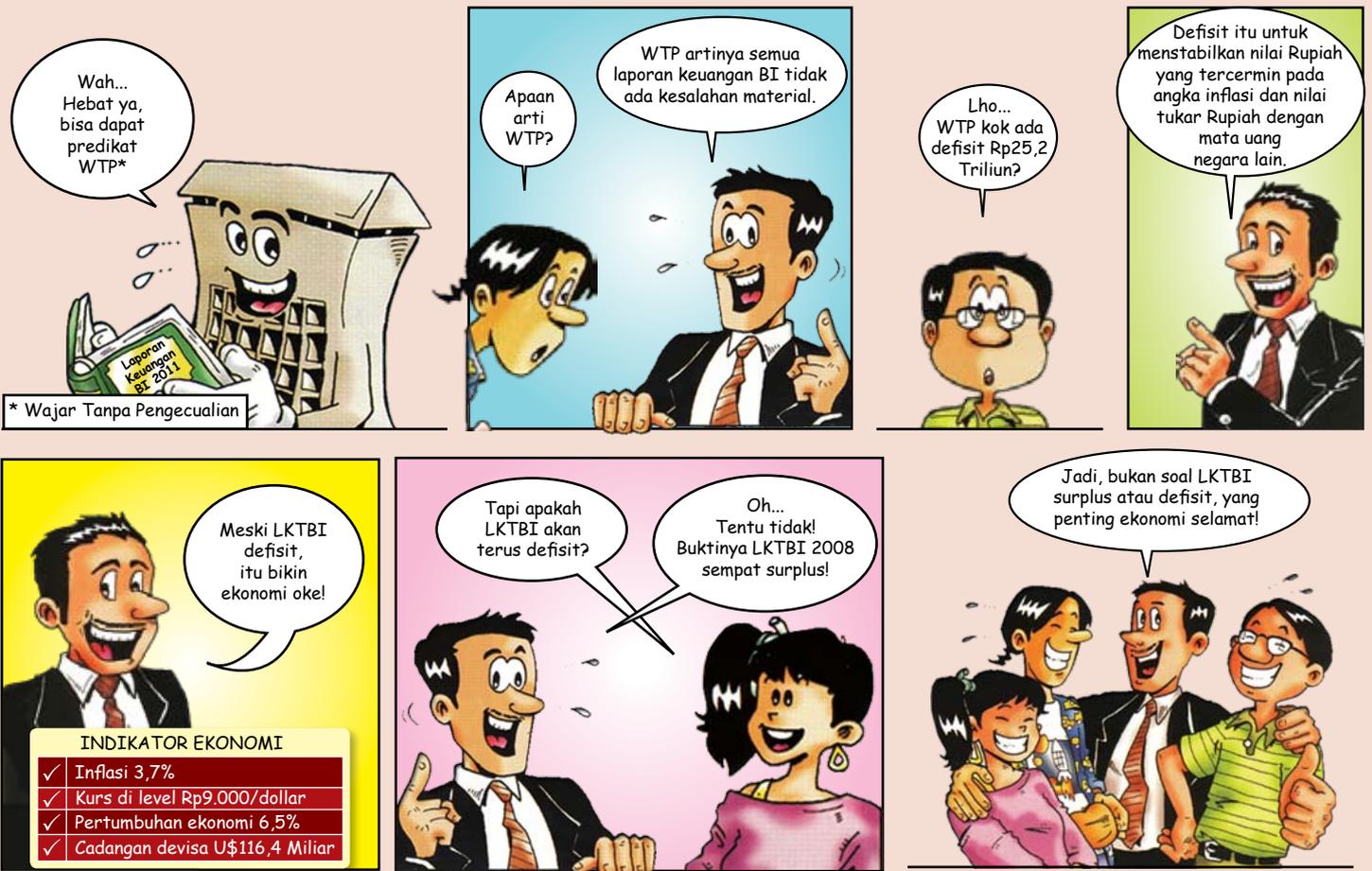
Tindak lanjut BI atas temuan pemeriksaan BPK mendapatkan apresiasi yang cukup baik pula dari BPK dengan tingkat penyelesaian temuan lebih dari 90%. Hal ini merupakan cerminan dari tingginya kesadaran satuan-satuan kerja BI dalam meningkatkan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseriusan BPK melakukan audit terhadap BI tidak terlepas dari pandangan Taufiqurrahman Ruki, salah satu Anggota BPK, yang mengatakan, "mengawal BI itu tugas mulia karena artinya sama dengan mengawal perekonomian negara kesatuan Republik Indonesia."

Nah, oleh karena itu bagi BI sendiri audit yang dilakukan BPK pun harus disikapi sebagai upaya untuk memastikan berjalannya tata kelola yang baik. ●

**Selain opini terhadap laporan keuangan, pemeriksaan BPK akan menghasilkan sejumlah temuan untuk ditindaklanjuti BI.**

# LKTBI 2011 Wajar Tanpa Pengecualian!



## Ketawa ala BI!

### Belajar Matematik

Guru : Anak-anak, latihan soal matematika ya...

MURID : Iya buuu...

Guru : Oke, pertanyaannya adalah Tante kalian memberi dua bungkus permen kemudian ditambah lagi lima bungkus permen, maka jawabannya adalah...?

Murid (serempak) : Makasih Tante...!!!!●

### Komplain

Yuni masuk ke sebuah perpustakaan dan berdiri di depan seorang pegawai perpustakaan tersebut sambil berkata, "Saya mau komplain".

"Ada apa, Nona?" sang petugas perpustakaan balik bertanya.

"Minggu lalu aku meminjam sebuah buku dari perpustakaan ini dan buku tersebut sangat tidak bermutu" Jelas Yuni.

"Memangnya kenapa, Nona?"

"Hurufnya kecil-kecil, tidak ada spasi, tidak ada paragraf, semuanya hanya huruf-huruf. Tidak ada gambar menarik, dan yang paling menyedihkan, buku itu sama sekali tidak menceritakan apapun padahal ada banyak nama orang di dalamnya!".

Petugas perpustakaan itu langsung terbelalak dan berkata, "Aha.. jadi Andalah orang yang membawa buku telepon kami yang hilang minggu lalu!".●

### Demo Alat Penghisap Debu

Bu Joko membuka pintu rumahnya yang diketok seorang tamu. Seorang pemuda berdasi berdiri di depannya, tiba-tiba langsung menupahkan sampah dan debu di ruang tamu bu Joko. Sebelum si Ibu marah, sang pemuda langsung mengoceh dengan percaya diri.

"Perkenalkan saya Iwan, akan mendemonstrasikan alat penghisap debu dan sampah dengan teknologi terbaru kami. Bila saya tidak bisa membersihkan sampah dan debu ini dalam waktu kurang dari 10 menit, saya akan jilat debunya dan makan sampahnya!!!

Bu Joko Cuma senyum manis, "Yo wis, mulai dima'em aja sekarang dek Iwan. listrik nya mati dari pagi, baru nyala besok siang" katanya sambil ngeluyur masuk kedapur.●

### Berdoalah dengan Jelas

Hamid dan Reza bersahabat, mereka selalu berdoa bersama setiap hari.

Hamid berdoa, "Tuhan yang Maha Bijak, berilah hamba-Mu ini kemudahan dalam mencari rezeki, semisal hanya dengan goyang-goyang kaki saja saya sudah mendapatkan uang. Wujudkan kerinduan hamba-Mu ini. Amin.

Mendengar doa Hamid, Reza juga langsung berdoa, "Tuhan, saya juga mohon diberi kemudahan dalam mencari rezeki ya Tuhan, semisal hanya dengan berkipas-kipas tangan, saya sudah bisa dapat uang. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Tuhan!"

Setelah dewasa, doa mereka pun dikabulkan!!!

Hamid menjadi Penjahit dan Reza menjadi Penjual Sate.●

# FORSTRA : Membangun BI Baru

Bank Indonesia tengah mempersiapkan perbaikan internal untuk menampilkan sosok bank sentral yang baru. Upaya perbaikan ini bukan semata terkait akan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pengawas bagi industri keuangan termasuk sektor perbankan yang selama ini ditangani BI, akan tetapi juga bagaimana upaya BI dalam mengawal Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Selama periode 2005-2011, indeks SSK dapat dijaga dengan baik terutama ditandai oleh indikator *net performing loan* yang jauh dibawah target maksimal, dan rasio modal berbanding risiko (CAR) jauh di atas target minimal. Terjaganya SSK juga ditopang keyakinan *stakeholders* terhadap SSK yang lebih dari cukup puas.

“BI akan terus mengawal penguatan SSK melalui bingkai

makroprudensial,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution pada *board retreat* dalam rangka Forum Strategis Bank Indonesia (Forstra) 2012. Forstra boleh dibilang sejenis Rapat Koordinasi (Rakor) Tahunan yang dihadiri seluruh pimpinan Departemen di BI,



Gubernur BI dan anggota Dewan Gubernur BI. Dalam Fostra ini dibahas beragam isu-isu strategis seperti penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank sentral, penanganan inflasi, pengawasan perbankan setelah terbentuknya

OJK, sistem pembayaran (non-tunai), krisis ekonomi global dan isu-isu lainnya.

Dari banyak isu strategis yang dibahas, isu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik menjadi perhatian besar peserta Forstra. Kapasitas perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masih bisa dipacu dari pencapaian tahun 2012 yang diprediksi pada angka 6,3%-6,7%. Pasalnya, sejarah mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai angka 8% meski diikuti angka inflasi *double digit*. “Andil BI dalam pertumbuhan ekonomi ialah mencapai dan menjaga stabilitas nilai Rupiah yang salah satunya tercermin pada angka inflasi yang rendah dan stabil,” tandas GBI Darmin Nasution. Pemerintah dan BI mematok angka inflasi di level 4,5% plus-minus 1% pada 2013 dan 2014, sedangkan pada 2015 dipatok angka 4% plus-minus 1%.●

# TUKAB Jamin Uang Layak Edar

Mendapat uang kertas lusuh memang tidak enak. Selain kumul terkadang ada saja pedagang yang enggan menerima uang kucel itu karena khawatir uang palsu. Uang lusuh bisa ditukarkan kepada bank-bank untuk diganti dengan yang lebih gres. Bank Indonesia meluncurkan program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang bertujuan untuk memenuhi uang layak edar dan cukup, baik nominal maupun pecahannya ke masyarakat. Program TUKAB ini sudah digelar diberbagai wilayah di Indonesia. Pada 1 Juni 2012, di Banjarmasin di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, diberlakukan Program TUKAB ini. Melalui program ini, bank dapat langsung berinteraksi di antara mereka jika mengalami

kelebihan atau kekurangan uang kartal, sehingga waktu distribusi uang tersebut semakin efisien.

“TUKAB Regional untuk wilayah Kalselteng ini merupakan langkah pengembangan dari TUKAB daerah yang telah ada dan telah berjalan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar kerjasama antar



perbankan lebih efektif mengingat karakteristik antara daerah Kalsel berbeda dengan Kalteng”, jelas

Khairil Anwar, Kepala Perwakilan BI Wilayah Kalimantan mengawali sambutannya dalam acara penandatanganan sekaligus *launching* TUKAB yang dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Kota Banjarmasin, Palangkaraya dan Sampit, serta disaksikan langsung oleh Kepala Group Kebijakan Penedaran Uang BI, Eko Yulianto.

Eko mengungkapkan bahwa TUKAB Regional Kalselteng ini merupakan yang keempat setelah TUKAB Regional Sumatera Utara dan Aceh, TUKAB Regional Jawa Timur dan TUKAB Regional Sumatera Barat. Jika semua daerah sudah melakukan TUKAB regional maka tidak menutup kemungkinan dapat ditingkatkan menjadi TUKAB pada level nasional.●

## Lelang Term

## Deposit Valas

## Oversubscribed

Bank Indonesia (BI) memperkenalkan sebuah instrumen moneter teranyar bertajuk *Term Deposit* (TD) Valutas Asing (valas) pada Juni 2012. Sebelumnya, BI telah memanfaatkan instrumen TD Rupiah. Kedua instrumen ini dimaksudkan untuk menyerap eksekus likuiditas baik rupiah maupun valas. Sebagai instrumen baru, TD Valas rupanya sudah kebanjiran peminat. Tengok saja lelang yang digelar pada 13 Juni 2012, mengalami *oversubscribed*. Penawaran lelang yang masuk untuk TD Valas bertenor 7 dan 14 hari membukukan angka US\$1.615 juta, padahal targetnya hanya US\$700 juta.

Dari total penawaran yang masuk tersebut, dimenangkan sesuai dengan target yaitu sebesar USD 700 juta yang terdiri dari tenor 7 hari sebesar USD 550 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang 0,16709% dan tenor 14 hari sebesar USD 150 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang 0,18000%. Ke depan, BI akan menggelar lelang TD Valas secara reguler setiap hari Rabu dan hari kerja lain. TD Valas menjadi alternatif *outlet* penempatan devisa bagi bank sekaligus mengurangi ketergantungan pada *outlet* penempatan di bank luar negeri. BI akan mengelola devisa tersebut melalui berbagai transaksi devisa untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus sebagai instrumen moneter.●

# Olimpiade Perbankan Agar Pelajar Melek Bank

## OLIMPIADE PERBANKAN

"Ayo Ke Bank Cerdaskan Bangsa"



Kata Olimpiade yang selama ini begitu lekat dengan dunia olahraga, akhir-akhir ini pemakaiannya mulai bergeser. Tengok saja sudah sering pelajar Indonesia menyabet medali pada Olimpiade Fisika, Matematika, Kimia di level internasional. Bank

Indonesia dengan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kalangan perbankan pun sepakat untuk menggelar Olimpiade Perbankan 2012 dengan tema "Ayo ke Bank, Cerdaskan Bangsa". Tujuannya agar para pelajar di tingkat sekolah dasar dan lanjutan pertama ini lebih punya pengetahuan dan wawasan dunia keuangan dan perbankan.

Rencananya, olimpiade ini akan diselenggarakan dua tahap. Tahap pertama, pada level regional akan menyeleksi satu tim di tingkat SD dan SMP terbaik yang mewakili tujuh kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin dan Makasar. Pemenang dari masing-masing kota tersebut akan dikirim ke Jakarta untuk bertarung pada babak final. Olimpiade

Perbankan ini berbeda dengan lomba cerdas cermat, karena pada olimpiade ini peserta akan diasah pengetahuan pada bidang ekonomi dan perbankan, bidang kewarganegaraan dan kebudayaan nasional. Kehadiran dua topik di luar sektor keuangan dan perbankan dimaksudkan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme siswa serta memahami karakteristik budaya bangsa sehingga tak luntur ditelan jaman. ●



## BPR Award, Reward Yang Berprestasi



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Batam bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) di Kepulauan Riau (Kepri) menggelar acara BPR Award. Penghargaan ini dimaksudkan agar kalangan pelaku BPR di Kepri memacu kinerja dan pelayanan ke arah yang lebih baik sesuai amanah

awal berdirinya institusi keuangan mikro tersebut. Dengan kinerja yang oke, diharapkan BPR bisa menjadi kontributor dalam menggenjot roda pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil di daerah.

Menurut Kepala Perwakilan BI Batam, Elang Tri Praptomo, pemberdayaan BPR dan sektor UMKM

perlu dilakukan secara simultan agar dalam prosesnya, kedua sektor tersebut dapat saling melengkapi dan bekerja sama secara saling menguntungkan. "Dalam mempertahankan eksistensinya ke depan, BPR harus senantiasa dapat menggali potensi *competitiveness* yang dimilikinya untuk mengoptimalkan keuntungan dan berupaya menekan seminimal mungkin risiko-risiko yang ada dalam kegiatan usahanya," ujar dia saat penyerahan BPR Award di lingkup Kepri, di Batam, 1 Juni 2012.

Setelah menyeleksi 41 BPR, keluar tiga jagoan yakni PT BPR Danamas Simpan Pinjam untuk kategori aset di atas Rp100 miliar, PT BPR Kintamas Mitra Dana untuk aset Rp50 miliar – 100 miliar, dan PT BPR Kepri Batam dengan aset dibawah Rp50 miliar. Penyelenggaraan BPR Award ini merupakan yang ketiga kali dengan peserta terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Pada 2008, jumlah BPR hanya 13 buah yang bertambah menjadi 41 BPR dengan total aset sebesar Rp2,9 triliun pada awal 2012. ●

# Memotret Potensi Daerah dengan BLS

Memiliki informasi sering diidentikkan seperti punya kekuatan besar. Begitu kata orang bijak. Pernyataan itu benar adanya bila dilihat fakta lapangannya. Buktinya, siapa pun yang punya potensi data



ekonomi tentang suatu daerah, bila orang itu bisa memanfaatkannya bisa

menjadi sebuah peluang usaha yang besar. Begitu pula ketika Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu yang bekerjasama dengan Universitas Bengkulu merampungkan proyek *Baseline Economic Survey* (BLS), potret potensi ekonomi Bengkulu pun terekam dalam laporan itu.

Tujuan disusunnya BLS antara untuk memperbaharui BLS yang disusun tahun 1990-an dan memberi panduan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang produk/jasa unggulan yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota di Bengkulu. Keberadaan data yang terkini tersebut akan memudahkan bagi pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah Bengkulu dalam menyusun kebijakan me-

reka di bidang perekonomian. “Kami berharap hasil penelitian ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan Bengkulu dan bukan hanya menjadi koleksi arsip,” ujar Kepala KPw Bengkulu Causa Iman Karana ketika menyerahkan hasil riset BLS kepada Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah, 28 Mei 2012.

Junaidi Hamzah menyampaikan terimakasih kepada KPw BI Bengkulu yang telah melakukan penelitian yang berguna bagi Pemerintah Propinsi Bengkulu dan masyarakat luas, dan atas kepercayaan untuk memanfaatkan sumberdaya lokal seperti tim peneliti Universitas Bengkulu dalam proyek riset tersebut. Selaku Plt Gubernur Bengkulu, ia mengeluarkan instruksi agar seluruh Kepala Bappeda yang ikut hadir dalam acara serahterima BLS tersebut memanfaatkan hasil BLS sebagai acuan dalam menyusun prioritas pembangunan ekonomi. ●

# Mengendalikan Inflasi Dengan Mensejahterakan Petani



Siapa sih yang menyangka kalau kaum ibu-ibu dari istri petani juga piawai dalam olah vokal. Buktinya paduan suara para istri kelompok tani mampu mendendangkan sejumlah lagu dengan apik. Belum lagi suguhan kesenian tradisional kelompok Gepok Lesong dan grup Pek Bung Tri Manunggal semakin bikin meriah acara penandatanganan kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 7 Juni 2012. Ketika

itu kedua belah pihak menyepakati untuk menyukseskan program Ketahanan Pangan Komoditas Beras dan Pembukaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

Lho, apa urusannya BI dengan ketahanan pangan dan SLPTT? Begini. Mandat BI selaku bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai Rupiah yang tercermin pada angka inflasi dan nilai tukar Rupiah dengan mata uang negara lain. Salah satu penyumbang terbesar pergerakan angka inflasi adalah kelompok bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, cabai dan lainnya. Bila kelompok bahan pangan itu bergejolak, maka dampaknya kenaikan harga dan angka inflasi.

Menurut Kepala Perwakilan BI DIY, Mahdi Mahmudy, bank sentral memandang perlu adanya akselerasi sektor riil dan UMKM, diantaranya melalui pelaksanaan program

ketahanan pangan, khususnya untuk komoditas yang memiliki andil cukup besar terhadap inflasi. Seperti diketahui, Kabupaten Bantul dikenal sebagai penghasil beras di wilayah Yogya dan sekitarnya. Apalagi kabupaten ini termasuk salah satu yang berhasil menerapkan sistem ketahanan pangan sehingga bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

Kehadiran BI dalam program tersebut untuk menginisiasi program penguatan ketahanan pangan di daerah melalui pilot program komoditas guna mendukung program Pemkab Bantul dalam meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas beras, dan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengangkat harkat petani yang lahannya sempit atau yang menjadi petani penggarap, akan disewa lahan seluas 4 ha selama setahun untuk digarap petani terpilih. “Diharapkan program ini dapat meningkatkan perekonomian daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat warga Bantul yang sebagian besar adalah petani dengan kepemilikan lahan terbatas,” ujar Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati. ●

# Museum BI Terbaik Se Jakarta

Menapakkan kaki di gedung Museum Bank Indonesia (MBI) di kawasan Kota Lama, Jakarta seperti memasuki dunia tempoé doeloe. Gedung bergaya arsitek khas abad pertengahan dengan pilar-pilar besar dan tinggi itu sudah membawa kesan jadul tapi artistik. Gedung MBI ini dulunya dipakai oleh De Javasche Bank (DJB) yang didirikan pada tahun 1828. DJB adalah bank di era pemerintahan Hindia Belanda. Gedung DJB ini lalu dipakai Bank Indonesia selaku bank sentral yang didirikan pada 1 Juli 1953. Seiring dengan perjalanan waktu, eks gedung DJB ini sempat tak lagi dipakai oleh BI.

Lalu mau dipakai untuk apa gedung tua dengan nilai sejarah tinggi ini? Dewan Gubernur BI pun memutuskan untuk memanfaatkan eks gedung DJB tersebut sebagai museum. Apalagi Pemerintah DKI Jakarta pun telah menetapkan eks gedung DJB ini sebagai Cagar Budaya yang kudu dijaga kelestariannya. Dalam museum ini tersimpan sejarah uang sejak era kolonial, pergerakan

kemerdekaan, orde lama hingga saat ini. Beragam koleksi mata uang tempoé doeloe itu pun tersimpan apik dalam MBI. Berkunjung ke MBI akan membawa pengunjung melihat sejarah perjalanan mata uang dan sejarah berdirinya Republik Indonesia.

Sebelum dipakai sebagai MBI, gedung ini sempat dipugar dan ditata asri dan cantik dibagian dalamnya agar cocok untuk menyimpan sejarah panjang kehadiran sebuah institusi bank di negeri ini sampai berdirinya bank sentral. Setelah merampungkan pemugaran, gedung eks DJB ini pun resmi dipakai menjadi MBI. Kesungguhan BI dalam mengelola MBI membuahkan hasil.

Pada 1 Juni 2012, MBI dianugerahi predikat "Museum Terbaik 2012" se Propinsi DKI Jakarta. Sebelum ini, MBI juga sempat dinobatkan sebagai "Museum Terfavorit di Indonesia" pada 2011 oleh Majalah National Geographic Traveler.

Anugerah sebagai Museum Terbaik diterima MBI saat perhelatan Malam Anugerah Purwakalagrha yang diselenggarakan dalam rangka Gerakan Cinta Museum yang digelar Pemkot DKI Jakarta bekerjasama dengan Komunitas Jelajah. MBI terpilih sebagai terbaik dari 64 museum di Jakarta, 18 museum lolos ke babak final. "Kami datangi setiap museum itu satu per satu. Kami amati mulai dari bagaimana mereka menata koleksi, kebersihan lingkungan, fasilitas penunjang yang dimiliki, sampai bagaimana pegawai museum melayani kami," kata DR. Suprawito, salah seorang juri. Dengan cara penilaian seperti itu, menurutnya, hasilnya relatif objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. ●



# OLIMPIADE PERBANKAN

*"Ayo Ke Bank Cerdaskan Bangsa"*



**OLIMPIADE PERBANKAN 2012**  
**Cerdaskan Bangsa**

BANK INDONESIA DAN POKJA EDUKASI MASYARAKAT  
DI BIDANG PERBANKAN  
2012